

# Analisis Indeks Pembangunan Manusia dan *Leverage* pada Ketersediaan dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah Munzir<sup>1\*</sup>, Yusron Difinubun<sup>\*</sup>, Yoga Andriyan<sup>3\*</sup>.

<sup>1,2,3</sup> Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

---

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh, indeks pembangunan manusia dan *leverage* terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan pemerintah daerah se-Sorong Raya. Populasi dan sampel penelitian ini adalah pegawai pada Kantor Sekretariat Daerah se-Sorong Raya. Jenis data penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan *Statistical Packages for Social Science* (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa , indeks pembangunan manusia dan *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan pemerintah daerah se-Sorong Raya.

Kata kunci : Indeks Pembangunan Manusia, *Leverage*, Keuangan Daerah.

\*Corresponding Author at Munzir Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Jl. KH. Ahmad Dahlan, No. 1, Mariat Pantai, Aimas, Kabupaten Sorong.  
E-mail address: [munzirpahlevi@gmail.com](mailto:munzirpahlevi@gmail.com)<sup>1</sup>,

## PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya otonomi daerah tahun 2001, pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan. Setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Otonomi daerah merupakan langkah maju untuk menjadikan pemerintah daerah lebih mandiri, daripada selalu mengandalkan pemerintah pusat. Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah agar pemerintah daerah dapat mengatur keuangan dan pengelolaan Keuangan daerah dengan baik.

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa desentralisasi adalah penyerahan kewenangan kepala daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam kesatuan sistem negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjadi landasan utama penyelenggaraan otonomi daerah.

Era globalisasi menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik sehingga menjadi dasar perumusan dan pelaksanaan kebijakan negara yang demokratis. Karakteristik pelaksanaan *good governance* menurut UNDP (1997) meliputi *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, dan strategic vision*. Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, artinya harus dicapai kontak dengan setiap orang. Mardiasmo (2002) menunjukkan bahwa pemerintah dapat memainkan tiga peran dalam membentuk *good governance*, yaitu membangun transparansi, akuntabilitas publik dan *value for money* (ekonomi, efisiensi dan efektivitas). Penerapan tata kelola yang baik menurut konsep *good governance* mengutamakan prinsip transparansi yang dapat ditafsirkan.

Era otonomi mengharuskan pengelolaan urusan pemerintahan terdesentralisasi, transparansi sangat dibutuhkan untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan sumber daya. Melalui transparansi pemerintah bahkan mampu mencegah situasi asimetris antara rendahnya kinerja daerah dengan tingginya keinginan pemekaran daerah (Difinubun, Yusron, & Gudono Muhammad, 2021). Transparansi merupakan syarat utama *good governance*. Meskipun demikian, harus diakui bahwa tranparansi adalah masalah pemerintah Indonesia saat ini. Pemerintah semakin dituntut untuk meningkatkan transparansi pengungkapan dan penyajian informasi anggaran dan keuangan. Kepedulian terhadap transparansi dapat ditunjukkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Republik Indonesia (No. 14 tahun 2008) yang menetapkan bahwa pejabat publik di semua tingkatan lebih transparan, bertanggung jawab, dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Undang- undang tersebut mengatur bahwa pemerintah daerah berkewajiban memberikan informasi dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh public (Hidayat, Muhamad, & Munzir, 2021).

Pengelolaan keuangan nasional merupakan kegiatan yang berdampak pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Rahmawati & Mahmud, 2016). Perubahan lingkungan eksternal terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dan memungkinkan mereka memiliki pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan transparan dalam mengelola keuangan daerah. Penanggung jawab daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, memberikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD, dan memberitahukan kepada masyarakat tentang pelaksanaan laporan tersebut oleh pemerintah daerah

Teori keagenan menjelaskan bahwa asimetri informasi disebabkan oleh perbedaan informasi antara pemerintah (*agent*) dan masyarakat (*principal*), masyarakat mendelegasikan tugas-tugas pemerintah daerah kepada pemerintah untuk kegiatan pemerintahan. Pemerintah mempunyai lebih banyak informasi mengenai tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, oleh

karena itu wajib melaporkan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut. Pekerjaan khusus sistem akuntabilitas keuangan pemerintah adalah mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dengan menyediakan informasi keuangan daerah (Munzir, Nurfatimah, & Nisak, Pengaruh Opinion Shopping, Dan Debt Default Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern, 2021).

Swadayamandiri (2008) mengemukakan bahwa untuk menjadikan sistem keuangan pemerintah daerah lebih transparan dan akuntabel, ada enam aspek yang perlu diperhatikan, yang merupakan prasyarat utama untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Keenam bidang tersebut adalah sistem pembukuan yang perlu ditingkatkan secara fundamental agar sesuai dengan sistem yang diterapkan oleh Menteri Keuangan, guna memastikan sinkronisasi dan integrasi data keuangan, daftar aset dan utang, jadwal penyusunan laporan keuangan, dan laporan keuangan. Sistem audit dan akuntabilitas anggaran, penjaminan mutu pengawas internal dan sumber daya manusia LKPD yaitu menentukan status fungsional bendahara, pengetahuan dasar akuntansi untuk bendahara atau pemegang buku, dan penggunaan tenaga BPKP atau pelatihan akuntansi keuangan daerah (Wulandary & Difinubun, 2021).

Pemilukada merupakan salah satu bentuk persaingan politik di masyarakat. Persaingan politik adalah persaingan untuk mendapatkan kekuasaan untuk mengontrol pemerintah dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk keuntungan politik dan sosial. Peran partai politik dalam pemilukada pasca-konflik sangat penting karena memiliki hak untuk mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bukan calon perseorangan. Pernyataan tersebut menginformasikan kepada parpol bahwa mereka pernah mengikuti antar pimpinan daerah. Dewi dan Aziz (2016) mengemukakan bahwa partai yang memiliki kesempatan untuk menunjuk kepala daerah dan wakilnya diduga melakukan pilkada pasca-konflik sebagai peluang untuk mencari uang.

Sumber daya manusia yang baik merupakan salah satu faktor dalam melaksanakan tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik membutuhkan komunitas yang berkembang dengan baik. Hasil pengujian yang dilakukan oleh Setyowati (2016) menunjukkan bahwa pembangunan manusia berdampak positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat pembangunan masyarakat maka keinginan masyarakat yang ingin dicapai akan semakin beragam, yang pada akhirnya akan menimbulkan lebih banyak tuntutan dari masyarakat terhadap pemerintah (Andriyan, Muhamad, Difinubun, & Hidayat, 2022). Keterbukaan informasi keuangan daerah menjadi salah satu syarat bagi masyarakat untuk memahami status keuangan dan hasil pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaian peristiwa tersebut menyebabkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Pemerintah menggunakan hutang untuk mendanai kegiatan masyarakat. Utang daerah dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan perbankan, lembaga keuangan nonbank dan masyarakat. *Leverage* adalah kemampuan perusahaan untuk menggunakan jumlah aset yang dimilikinya untuk menjamin dana pinjaman. *Rasio leverage* menunjukkan sejauh mana dana pinjaman digunakan untuk mendanai aset milik pemerintah daerah (Sinaga, 2011). Semakin rendah tingkat *leverage* maka semakin kuat kemampuan entitas untuk membiayai biaya operasional melalui dana internal. Semakin besar *leverage* maka semakin kuat pula kemampuan entitas untuk membiayai sendiri biaya operasionalnya karena adanya kebutuhan dana eksternal (Diani, 2016). Berdasarkan teori keagenan, besarnya hutang organisasi menjadi keputusan manajemen organisasi untuk transparansi keuangan daerah.

Penelitian mengenai ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti di Indonesia. (Hanifah, 2017) melakukan penelitian mengenai Pengaruh, Indeks Pembangunan Manusia, dan *Leverage* terhadap Ketersediaan dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah Pada Website Resmi Pemerintah Daerah Di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada model penelitian I indeks pembangunan manusia dan *leverage* berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah, sedangkan tidak berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah. Hasil model penelitian II adalah indeks pembangunan manusia dan *leverage* berpengaruh terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah, sedangkan tidak berpengaruh terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Wau (2015) yang meneliti tentang pengaruh analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan keteraksesan internet financial reporting oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan 2 model. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam pengujian model I pendapatan per kapita dan opini audit memiliki pengaruh terhadap ketersediaan IFR oleh pemerintah daerah, sedangkan, ukuran pemerintah daerah, dan rasio kemandirian finansial tidak berpengaruh terhadap ketersediaan IFR pada *website* pemerintah daerah. Pada pengujian model 2 menunjukkan bahwa rasio kemandirian finansial memiliki pengaruh terhadap keteraksesan IFR pada *website* pemerintah daerah, sedangkan, ukuran pemerintah daerah, pendapatan per kapita, dan opini audit tidak berpengaruh terhadap keteraksesan IFR pada *website* pemerintah daerah (Wulandary et al., 2022). Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Putra & Syofyan, 2020) Hasil penelitian menemukan variabel ukuran pemerintahan, pendapatan per kapita dan *leverage* yang tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas laporan keuangan internet oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Studi lanjutan yang dilakukan oleh (Nosihana & Yaya, 2016) memperoleh hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Menurut penelitian yang telah selesai, persaingan politik akan berdampak pada rilis laporan keuangan melalui Internet. Besar kecilnya pemerintahan daerah (pemerintah daerah) juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap rilis laporan keuangan (Rini, Khaerani, et al., 2022). Rasio pembiayaan hutang (*leverage*), aset pemerintah daerah, jenis pemerintah daerah dan opini audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaporan keuangan Internet (Rini, Fakdawer, et al., 2022). Studi sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan daerah pada situs resmi pemerintah daerah tidak konsisten, hal ini semakin memperparah perdebatan di kalangan praktisi, oleh karena itu penelitian tentang transparansi informasi keuangan daerah menjadi sangat penting.

Penelitian ini mengutip penelitian yang dilakukan oleh (Laswad et al., 2005) di Selandia Baru. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel independen yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu dan *leverage*. Variabel dan *leverage* dipilih karena hasil penelitian sebelumnya masih berbeda. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menambahkan variabel bebas baru yaitu indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia dianggap sebagai variabel yang dapat mendukung terwujudnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah (Wulandary & Difinubun, 2021).

Berdasarkan latar belakang masalah yang berkaitan dengan kajian empirik/fakta dan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul "Pengaruh , Indeks Pembangunan Manusia, Dan *Leverage* Terhadap Ketersediaan Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah se-Sorong Raya".

## LITERATURE REVIEW

### Teori keagenan (*agency theory*)

Teori keagenan adalah sejenis hubungan keagenan, ini adalah semacam kontrak, dimana satu atau lebih (prinsipal) mendelegasikan kekuatan pengambilan keputusan tertentu kepada agen untuk mempekerjakan orang lain (agen) untuk menyediakan banyak layanan untuk kepentingan mereka sendiri (Jensen & Meckling, 1976). Benturan kepentingan akan muncul dari pendelegasian tugas yang dipercayakan kepada agent, dimana kepentingan agent bukan untuk memaksimalkan kesejahteraan principal, tetapi cenderung mengorbankan kepentingan owner dengan cara yang egois.

Organisasi sektor publik pada dasarnya didasarkan pada teori keagenan. Terlepas dari diterima atau tidaknya, ada hubungan dan masalah keagenan dalam pemerintahan (Halim & Abdullah, 2006). Mardiasmo menjelaskan bahwa dalam konteks organisasi sektor publik, akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah sebagai task leader yaitu memberikan akuntabilitas kepada seluruh wali amanat (masyarakat), menyatakan, melaporkan dan mengungkapkan seluruh wali amanatnya. Tanggung jawab Kegiatan dan kegiatan. Hak untuk menuntut akuntabilitas. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemerintah daerah berperan sebagai agen yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat dalam hal ini sebagai *principal*. Sebagai *Principal*, masyarakat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Sebagai agen, pemerintah daerah berkewajiban melaporkan kepada masyarakat hasil pelaksanaan penerimaan dan penggunaan sumber daya berupa laporan keuangan oleh pemerintah.

Hubungan keagenan akan menimbulkan masalah keagenan berupa asimetri informasi. Asimetri informasi adalah perbedaan kepentingan informasi antara agen dan prinsipal. Pemerintah memiliki lebih banyak informasi daripada publik. Pemerintah cenderung mengedepankan kepentingan pribadi tanpa persetujuan publik, sehingga informasi yang diterima publik terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak dapat memantau semua kegiatan, tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Menurut penelitian (Wau, 2015), masalah asimetri informasi akan menimbulkan biaya keagenan, yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk memberikan informasi yang transparan kepada publik. Biaya agensi adalah biaya yang berkaitan dengan pengawasan pemerintah komunitas. Jensen & Meckling (1976) mengelompokkan tiga jenis biaya keagenan, yaitu: yang pertama *monitoring costs* merupakan biaya pengawasan yang dilakukan oleh principal untuk memonitoring kegiatan agent (the monitoring expenditures by the principal), kedua *bonding costs* merupakan biaya jaminan yang dikeluarkan oleh agen untuk membentuk mekanisme jaminan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (the bonding expenditure by the agent) dan yang ketiga *residual costs* merupakan kerugian residual yang berkaitan dengan biaya untuk mendorong agen agar bertindak sesuai dengan kemampuannya untuk kepentingan prinsipal.

### Kompetisi Publik

Salah satu perubahan mendasar pasca reformasi adalah persaingan politik yang semakin ketat di Indonesia. Bardhan dan Yang (2004) dalam Nairobi & Jaya (2014) menjelaskan bahwa persaingan politik adalah persaingan memperebutkan kekuasaan untuk mengontrol pemerintah dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan politik dan sosial. Downs (1957) dari (Nairobi & Jaya, 2014) mendefinisikan persaingan politik sebagai persaingan antar kandidat, yaitu mereka mendapatkan suara terbanyak dari pemilih untuk menjalankan platform kebijakan yang layak.

Persaingan politik yang tinggi akan meningkatkan biaya, menyebabkan kepala daerah terpilih sering mengabaikan janji pilkada pasca konflik. Pencalonan kepala daerah tidak lepas dari parpol pendukungnya. Zaman (2016) mendefinisikan partai politik sebagai organisasi politik yang didirikan secara sukarela oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia. Cita-cita dan keinginannya yang sama adalah memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, negara dan negara secara universal. pemilu. Gatara (2008) mengemukakan bahwa setiap definisi partai politik akan berkaitan dengan kekuasaan (jabatan publik atau politik) yang merupakan tujuan keseluruhan dari setiap partai politik dalam menjalankan aktivitasnya. Posisi partai politik dalam pemilihan kepala daerah memiliki arti strategis. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang mengatur bahwa semua calon yang berhak maju ke kompetisi harus dicalonkan oleh partai politik tertentu. Caleg utama daerah yang berhak dipromosikan harus melalui partai politik atau aliansi parpol yang menguasai 15% kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau memberikan suara pada pemilihan legislatif.

Zaman (2016) menunjukkan bahwa sebagai organisasi yang mengutarakan kepentingan rakyat, partai politik biasanya dikaitkan dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Pembentukan partai politik mempengaruhi jalannya pemerintahan dengan mencalonkan calon pejabat publik termasuk kepala daerah. Bentuk nyata kader produksi partai adalah mengikuti pemilihan kepala daerah. Parpol itu sendiri atau anggotanya yang mengajukan calon kepala daerah juga ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Pilkada merupakan arena dimana partai politik bersaing dengan partai lain untuk memperebutkan kekuasaan lokal.

Teori keagenan menjelaskan bahwa persaingan politik berkaitan dengan motivasi dan kebijakan pemerintah daerah. Sebagian besar informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah merupakan informasi yang dimiliki oleh kepala daerah. Persaingan politik yang ketat menuntut para pemimpin dan pejabat daerah untuk lebih transparan tentang informasi yang mereka miliki. Tujuan tuntutan agar para pemimpin daerah tidak hanya menyadari kepentingannya dan partai politik yang mereka dukung. Penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya diawasi oleh masyarakat, tetapi juga oleh lawan dari Bupati dan Parpol yang tidak memilih Bupati pada Pilkada pasca-konflik. Teori kelembagaan juga menjelaskan adanya asimetri informasi, sehingga masyarakat menuntut pemerintah daerah untuk mengutamakan kepentingan masyarakat. Semakin ketatnya persaingan politik diharapkan pemerintah daerah juga dapat meningkatkan perwujudan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Persaingan politik atau disebut juga persaingan politik terlihat dari persaingan antar partai politik, mereka bisa mendapatkan jumlah pemilih dalam pemilu. Persaingan politik menggambarkan derajat persaingan politik antara pemimpin daerah saat ini dengan lawan politiknya (Diani, 2016). Rahim dan Martani (2010) mengemukakan bahwa persaingan politik diwujudkan dalam derajat persaingan memperebutkan jabatan kepala daerah. Semakin banyak lawan yang mengikuti pilkada, persaingan politik semakin ketat. Persaingan politik yang tinggi adalah bentuk pengawasan atas pemerintah yang dipilih secara demokratis. Akibat pengawasan lawan politik, pemerintah daerah dengan persaingan politik yang ketat semakin termotivasi untuk melaporkan informasi tentang pelaksanaan pemerintahan (Andriyan et al., 2022).

Kesimpulannya adalah yang besar akan menghasilkan pengawasan yang semakin besar pula dan Pemda (khususnya kepala daerah) sebagai pihak yang diawasi akan menanggung *monitoring cost* yang besar pula.

## Indeks Pembangunan Manusia

*United Nations Development Programme* atau UNDP (1990) menunjukkan bahwa pembangunan manusia adalah proses memperluas pilihan manusia ("*a process of enlarging peoples's choices*"), yang menekankan pada kebebasan untuk sehat (health), terdidik (educated), dan mendapatkan standar hidup yang lebih baik. Ini dapat didefinisikan sebagai berikut: Aset berharga suatu negara adalah sumber daya manusia.

Menurut laporan UNDP (1995), prinsip-prinsip dasar dari konsep pembangunan manusia meliputi aspek-aspek yaitu: pembangunan harus fokus pada populasi, pembangunan berarti menambah pilihan yang dimiliki penduduk, tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka (Sutikno et al., 2022). Konsep pembangunan manusia harus berpusat pada kependudukan, bukan hanya aspek ekonomi, pembangunan manusia tidak hanya berfokus pada upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia, tetapi juga pada penggunaan terbaik dari kemampuan manusia tersebut, pembangunan manusia memiliki empat pilar utama, yaitu produktivitas, pemerataan, keberlanjutan, dan pemberdayaan dan pembangunan manusia adalah dasar untuk menentukan tujuan pembangunan dan menganalisis pilihan untuk mencapai tujuan tersebut (Ws et al., 2022).

Tujuan akhir dari pembangunan adalah untuk menyejahterakan rakyat. Umat manusia bukan hanya obyek pembangunan, tetapi juga obyek yang dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan suatu bidang tertentu, dan bidang-bidang tersebut menjadi kemajuan suatu negara di tingkat makro (Widarwanto, 2014). UNDP yang mengusulkan dan mendukung konsep pembangunan manusia, mengembangkan indikator yang secara deskriptif dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia, yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia ditinjau dari aspek kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) dan non fisik (intelektual) (Saputra, 2011). Pembangunan yang mempengaruhi kondisi fisik masyarakat tercermin dari angka harapan hidup dan daya beli masyarakat, sedangkan dampak non fisik tercermin pada kualitas pendidikan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator strategis yang banyak digunakan untuk melihat dampak upaya dan kinerja pembangunan daerah. Indikator ini mempunyai arti yang sangat luas karena menunjukkan kualitas penduduk di daerah dengan harapan hidup, pengetahuan dan standar yang layak. hidup. (Saputra, 2011). Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk memperoleh hasil pembangunan dari segi pendapatan, kesehatan, pendidikan, dll (BPS 2015).

Sumber daya manusia yang berkualitas membuat masyarakat semakin sadar akan kebutuhan informasi keuangan daerah. Masyarakat juga tahu perannya dalam memantau kegiatan pemerintah daerah. Menurut teori kelembagaan, sumber daya manusia yang baik akan membutuhkan pengetahuan tentang informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah merupakan sarana untuk menysasar masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya. Personel yang berkualifikasi akan menerima informasi keuangan daerah dengan baik, sehingga mengurangi asimetri informasi. Indeks pembangunan manusia yang ditetapkan dengan metode tiga dimensi dasar mudah dihitung dalam pengoperasiannya, sehingga diperoleh indeks yang mencerminkan upaya pembangunan manusia. Todara (2003) menunjukkan bahwa ketiga aspek tersebut meliputi umur panjang, pengetahuan dan standar hidup.

## Leverage

Jika pemerintah membelanjakan lebih dari penggalangan dana, pemerintah akan meminjam dari swasta untuk menutupi defisit anggaran (Mankiew 2009: 420). Akumulasi pinjaman ini dikaitkan dengan hutang pemerintah. Rasio *leverage* menunjukkan sejauh mana rasio tersebut menggambarkan rasio jumlah hutang pihak luar terhadap dananya sendiri (Medina, 2012). Minarsih (2015) mengemukakan bahwa *leverage* terkait dengan penggunaan aset atau dana, dan pemerintah daerah harus menanggung biaya tetap atau biaya tetap. Besarnya hutang organisasi berdasarkan teori keagenan merupakan pendorong bagi manajemen organisasi untuk mengungkapkan laporan keuangan yang lebih baik (Ratmono, 2013).

Tingkat pembiayaan utang (*leverage*) berdasarkan teori kelembagaan digunakan sebagai pertimbangan pemerintah daerah dalam memberikan informasi tersebut kepada pihak terkait. Memberikan informasi tentang *leverage* dapat mengurangi asimetri informasi. Hal itu dilakukan untuk membuktikan kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi utangnya (Munzir, Nurfatihah, & Nisak, Pengaruh Opinion Shopping, Dan Debt Default Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern, 2021). Kontrak perjanjian utang mengharuskan pemerintah memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada kreditor tentang kinerja keuangan mereka. Laswad et al. (2005) percaya bahwa menggunakan hutang untuk mengumpulkan dana untuk pelayanan publik akan memungkinkan para manajer politik (pemimpin daerah) untuk mencoba mengurangi biaya hutang. Menurut Ratmono (2013), besarnya hutang dapat menyebabkan organisasi menerapkan *mandatory isomorphism* untuk mengatasi tekanan kreditor. Isomorfisma wajib dapat berbentuk konvensi pelaporan keuangan, yang lebih mudah diperoleh kreditor.

Rasio hutang atau *leverage* sangat penting bagi kreditor ketika mengambil keputusan kredit kepada pemerintah daerah. Kreditor menggunakan rasio ini untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi utangnya. Jika rasio ini tinggi, maka pemerintah daerah mungkin sudah terlilit utang atau harus mencari cara untuk mengurangi utang (Sesotyanyngtyas, 2012).

Hutang yang digunakan untuk mendanai kegiatan masyarakat memberikan insentif bagi para pemimpin daerah untuk mengurangi biaya hutang (Zimmerman & Wieder, 1977), Laswad et al., 2005). Hal ini dapat dicapai dengan pengungkapan informasi secara sukarela yang akan membantu kreditor untuk memantau. Pengungkapan tambahan dapat dilakukan dalam bentuk kertas tradisional dari laporan keuangan dan media lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mendefinisikan kewajiban sebagai hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu Penyelesaian peristiwa tersebut menyebabkan keluarnya sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas adalah aset bersih pemerintah, dan merupakan perbedaan antara aset dan kewajiban. Utang daerah atau pinjaman daerah bisa berasal dari: pemerintah pusat dimana berasal dari APBN termasuk dana investasi pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri dan/atau penerusan pinjaman luar negeri, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, lembaga keuangan bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masyarakat, berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri. (Minarsih, 2015) menunjukkan bahwa walaupun dengan *leverage* yang rendah, kinerja dimasa mendatang akan menurun karena adanya pembayaran hutang dan pembayaran bunga yang akan membebani pemerintah daerah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **(X1) Berpengaruh Terhadap Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah (Y1)**

Hipotesis pertama (H1a) diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah. Berdasarkan hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah, sehingga hipotesis pertama (H1a) diterima. Menurut Nairobi & Jaya (2014) menjelaskan bahwa persaingan politik adalah persaingan memperebutkan kekuasaan untuk mengontrol pemerintah dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan politik dan sosial. Jika dikaitkan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat persaingan politik akan mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan memberikan informasi keuangan daerah dalam upaya menyediakan atau tersediannya informasi keuangan daerah dengan mudah. yang tinggi menimbulkan tuntutan mengenai transparansi informasi keuangan daerah juga akan semakin meningkat. Hal tersebut terjadi karena semakin banyak pihak yang memerlukan informasi tersebut untuk mengetahui keadaan pemerintahan terutama keadaan keuangan pemerintah daerah. Tuntutan dari berbagai pihak mengenai transparansi informasi keuangan daerah dapat dipenuhi dengan cara menyediakan informasi keuangan daerah.

Penelitian ini sejalan dengan teori keagenan yang mana pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang mana sebagai *principal* bentuk strategi tersebut merupakan menyediakan informasi keuangan daerah secara terbuka dengan mudah agar masyarakat juga bisa melihat kinerja pemerintah daerah. Apabila kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah. Teori keagenan menyatakan bahwa informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah lebih banyak dibandingkan informasi yang dimiliki oleh masyarakat. Pemerintah daerah cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dan partai politik, sehingga memunculkan terjadinya asimetri informasi. Masyarakat sebagai pihak yang tidak terlibat langsung mengawasi kegiatan dalam pemerintahan menyebabkan kurangnya informasi yang dimiliki. Informasi keuangan daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai media pengawasan oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan. Penyediaan informasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah transparan terhadap pengelolaan anggaran daerah.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nosihana dan Yahya (2016) yang menunjukkan bahwa berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah. Adapun penelitian Hanifah (2017) yang menunjukkan bahwa tidak berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah.

#### **(X1) Berpengaruh Terhadap Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah (Y2)**

Hipotesis pertama (H1b) diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah. Berdasarkan hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah, sehingga hipotesis pertama (H1b) diterima. Menurut Nairobi & Jaya (2014) menjelaskan bahwa persaingan politik adalah persaingan memperebutkan kekuasaan untuk mengontrol pemerintah dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan politik dan sosial. Afryansyah (2013) menyatakan bahwa perilaku oportunistik ini mungkin akan berkurang jika ada oposisi yang kuat untuk memantau kelompok yang ada di pemerintah.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat persaingan politik menjadikan pemerintah daerah harus lebih dapat memenuhi kepentingan semua pihak. Semakin banyak partai politik pendukung kepala daerah maka masyarakat dan pihak lain terutama pesaing kepala daerah pada pemilukada semakin menuntut pemerintah daerah lebih transparan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Pertanggungjawaban keuangan daerah dapat diwujudkan dengan kemudahan dalam mengakses informasi keuangan daerah. Penelitian ini sejalan dengan teori keagenan menjelaskan bahwa yang tinggi akan semakin banyak pihak yang ikut mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Hal tersebut terjadi karena berbagai pihak ingin memiliki informasi yang sama dengan informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Perbedaan informasi dapat diatasi dengan cara pemerintah daerah memberikan akses yang mudah untuk memperoleh informasi keuangan daerah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nosihana dan Yahya (2016) yang menunjukkan bahwa berpengaruh terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah. Adapun penelitian Hanifah (2017) yang menunjukkan bahwa tidak berpengaruh terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah.

### **IPM (X2) Berpengaruh Terhadap Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah (Y1)**

Hipotesis kedua (H2a) diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh IPM terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah. Berdasarkan hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah, sehingga hipotesis kedua (H2a) diterima. Menurut (Setyowati, 2016) menjelaskan bahwa Tingkat pembangunan masyarakat menunjukkan tingkat kemajuan yang dicapai suatu masyarakat. Jika dikaitkan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa Semakin tinggi pembangunan masyarakat akan menimbulkan tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk menyediakan informasi keuangan yang lebih lengkap dan rinci. Semakin tinggi pembangunan masyarakat, maka kualitas sumber daya manusia juga semakin baik sehingga keinginan masyarakat yang ingin terpenuhi akan semakin beragam. Beragamnya keinginan masyarakat akan menimbulkan tuntutan kepada pemerintah daerah agar masyarakat juga memiliki informasi yang lebih luas mengenai pengelolaan anggaran daerah.

Penelitian ini sejalan dengan teori keagenan menjelaskan bahwa yang mana pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus memenuhi keinginan pihak *principal*. Pemenuhan tuntutan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara menyediakan informasi keuangan daerah yang lebih lengkap. Kualitas masyarakat yang baik akan menyadari perannya dalam pemerintahan daerah. Masyarakat akan mengetahui bahwa mereka berhak dan berperan dalam mengawasi kegiatan pemerintahan. Masyarakat dapat menilai kinerja dari pemerintah daerah melalui informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah tersebut.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Setyowati (2016) dan Hanifah (2017) yang menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah.

### **IPM (X2) Berpengaruh Terhadap Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah (Y2)**

Hipotesis kedua (H2b) diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh IPM terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah. Berdasarkan hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah, sehingga hipotesis kedua (H2b) diterima.

Menurut (Setyowati, 2016) menjelaskan bahwa Tingkat pembangunan masyarakat menunjukkan tingkat kemajuan yang dicapai suatu masyarakat. Jika dikaitkan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keberadaan masyarakat yang tingkat pembangunannya baik pula. Tingkat pembangunan masyarakat yang baik dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia pada masing-masing daerah. Pembangunan masyarakat yang baik akan melahirkan masyarakat dengan kualitas yang baik. Kualitas masyarakat yang tinggi akan meningkatkan rasa ingin berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan yaitu dengan cara berperan dalam mengawasi jalannya kegiatan pemerintah daerah. Pengawasan terhadap keuangan daerah oleh masyarakat dilakukan melalui informasi keuangan daerah.

Penelitian ini sejalan dengan teori keagenan dalam melandasi pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah yaitu indeks pembangunan manusia yang semakin tinggi mengandung arti bahwa kualitas sumber daya manusianya semakin baik. Perbedaan informasi yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat akan berkurang dengan cara pemerintah memberikan informasi yang dimilikinya kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga tidak hanya menyediakan informasinya, tetapi juga memperhatikan kemudahan dalam mengakses informasi tersebut. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Setyowati (2016) dan Hanifah (2017) yang menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah.

### **Leverage (X3) berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah (Y1)**

Hipotesis ketiga (H3a) diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh *leverage* terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah. Berdasarkan hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah, sehingga hipotesis ketiga (H3a) diterima. Styles & Tennyson (2007) berpendapat bahwa pembiayaan terhadap pengeluaran-pengeluaran pemerintah saat ini akan memberikan dampak pada kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan dan program terpadu bagi masyarakat dimasa mendatang. Jika dikaitkan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa hutang yang dimiliki oleh pemerintah daerah menjadi bagian yang sensitif bagi pemerintah daerah. Semakin tinggi jumlah hutang maka dapat diketahui bahwa penerimaan pemerintah daerah belum mampu untuk menutupi biaya kegiatan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki nilai *leverage* tinggi, cenderung enggan untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau kreditur. Hal tersebut dilakukan karena kinerja pemerintah dianggap kurang baik karena tingginya nilai *leverage* yang dimiliki. Pemerintah lebih memilih untuk menyimpan informasi tersebut agar masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan tidak mengetahui masalah yang ada pada pemerintahan (Munzir Munzir et al., 2022). Penjelasan tersebut dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi nilai *leverage* pemerintah daerah, maka semakin rendah pemerintah daerah dalam menyediakan informasi keuangan daerah. Pemerintah daerah yang memiliki nilai *leverage* rendah lebih cenderung menyediakan informasi keuangan daerah agar kinerja pemerintah daerah terlihat baik.

Penelitian ini sejalan dengan teori keagenan yang meyakini bahwa besarnya utang menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk menyediakan informasi keuangan daerah. Menurut teori keagenan, pemerintah memiliki lebih banyak informasi, termasuk informasi tentang jumlah utang pemerintah daerah. Pemerintah lebih berhati-hati dalam memberikan informasi tentang utangnya karena tidak ingin kinerjanya dinilai buruk.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hanifah (2017) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah. Adapun penelitian yang dilakukan (Putra & Syofyan, 2020) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah.

**Leverage (X3) berpengaruh terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah (Y2)**

Hipotesis ketiga (H3b) diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh *leverage* terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah. Berdasarkan hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah, sehingga hipotesis ketiga (H3b) diterima. Styles & Tennyson (2007) berpendapat bahwa pembiayaan terhadap pengeluaran-pengeluaran pemerintah saat ini akan memberikan dampak pada kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan dan program terpadu bagi masyarakat dimasa mendatang. Jika dikaitkan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa Tingkat *leverage* yang tinggi akan membuat pemerintah daerah enggan memberikan informasi kepada masyarakat, kreditur, maupun pihak lain yang berkepentingan (Rini et al., 2022). Jika publik mengetahui bahwa tingkat *leverage* pemerintah daerah tinggi, mereka akan menilai kinerja pemerintah daerah rendah. Masyarakat menganggap kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan pemerintah lemah. Hal ini terjadi karena pendapatan pemerintah daerah tidak dapat mendanai operasional pemerintah.

Penelitian ini sejalan dengan teori keagenan dimana Pemerintah dalam hubungan keagenan sebagai agen mendapat mandat dari masyarakat sebagai prinsipal untuk menjalankan tugas pemerintahan yaitu memberikan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Masyarakat mempercayai pemerintah untuk menggunakan dan mengelola sumber daya yang ada dan harus bertanggung jawab kepada masyarakat di masa yang akan datang. Hubungan teori keagenan menimbulkan masalah berupa asimetri informasi. Transparansi dan akuntabilitas menjadi jalan bagi pemerintah untuk mengatasi masalah asimetri informasi.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hanifah (2017) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah. Adapun penelitian yang dilakukan (Putra & Syofyan, 2020) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah.

**PENUTUP**

**Simpulan**

1. Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan pemerintah daerah se- Luwu Raya. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat kompetisi politik akan menimbulkan tuntutan mengenai transparansi informasi keuangan daerah juga akan semakin meningkat.
2. Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan pemerintah daerah se-Sorong Raya. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi pembangunan masyarakat akan menimbulkan tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk menyediakan informasi keuangan yang lebih lengkap dan rinci.

**Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas maka penulis memberikan saran antaran lain: Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi penelitian selanjutnya yang memiliki topik dan tema yang sama.

### Daftar Pustaka

- Achmad, K., & Efendi, Y. N. (2018). *Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat dan Stabilitas Politik Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Yudha*. 1–31.
- Andriyan, Y., Muhamad, S., Dfinubun, Y., & Hidayat, R. (2022). EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Desa Di Kota Tual). *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 17-24.
- Afryansyah, R. D. (2013). *Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi akuntansi di internet oleh pemerintah daerah*.
- Diani, R. P. (2016). *Analisi Determinan Pelaporan Keuangan Di Internet Oleh Pemerintah Daerah Di Indonesia*.
- Difinubun, Y., & Gudono, M. (2021). Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Ditinjau Dari Rasio Dan Indeks Keuangan. *Fair Unimuda*, 1(1), 62-91.
- Gatara, A. S. (2008). *Ilmu Politik*. Pustaka Setia.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2, 16.
- Hanifah, F. F. (2017). *Pengaruh , Indeks Pembangunan Manusia, Dan Leverage Terhadap Ketersediaan Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah Pada Website Resmi Pemerintah Daerah Di Indonesia*.
- Hidayat, R., Muhamad, S., & Munzir, M. (2021). Implikasi Kebijakan Tribun Timur Dalam Pemberitaan Infotainment Terhadap Nilai Berita Dan Profesionalisme Jurnalis. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adimistrasi Publik*, 67-77.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kurniawan, C. H., Atma, Novi, L., & Scorpiani, K. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Dan Keteraksesan Internet Financial Reporting Oleh Pemerintah Daerah Di Indonesia. 31(2), 184–206.
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). *Determinants of voluntary Internet financial reporting by local government authorities*. 24, 101–121. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2004.12.006>
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Medina, F. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Di Indonesia.
- Minarsih, R. A. (2015). Pengaruh size, wealth, leverage dan intergovernmental revenue terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah.
- Munzir Munzir, Felda Pramita, D., & Way, A. (2022). Pengaruh Struktur Financial Indicators Terhadap Kondisi Financial Distress pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *FAIR UNIMUDA*, 2(1), 46–56.
- Munzir, M., Hanggari Citra Rini, T., & Azis, M. (2021). Implementasi Corporate Social Responsibility Terhadap Citra Perusahaan. *Balance Vocation Accounting Journal*, 1-11
- Munzir, M., Nurfatimah, U. F., & Nisak, K. M. (2021). Pengaruh Opinion Shopping, Dan Debt Default Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern. *FAIR*

UNIMUDA, 1-16.

- Nairobi, & Jaya, W. K. (2014). *Lokal Di Indonesia: Studi Dalam Perspektif Ekonomi*.
- Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). *Internet Financial Reporting dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten D Indonesia*. 3(2), 87–101.
- Putra, A. A. A., & Syofyan, E. (2020). *Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pendapatan Per Kapita Dan Leverage Terhadap Keteraksesan Internet Financial Report Oleh Pemerintah Daerah*. 2(1), 2020–2034.
- Rahman, A., Sutaryo, & Budiatmanto, A. (2013). Determinan Internet Financial Local Reporting Di Indonesia. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 4(2), 946. <https://doi.org/10.17509/jaset.v4i2.10095>
- Rahmawati, R. A., & Mahmud, A. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5, 9.
- Setyowati, L. (2016). Determinan Yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 6(April), 45–62. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3120>
- Sinaga, Y. F. (2011). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Di Internet Secara Sukarela Oleh Pemerintah Daerah*.
- Styles, A. K., & Tennyson, M. (2007). The Accessibility Of Financial Reporting Of U.S. Municipalities On The Internet. *J. Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.: Alfabeta. *Hilos Tensados*.
- Suhartono, S., & Jessica, N. (2020). *Pengaruh Intergovernmental Revenue, Indeks Pembangunan Manusia, Kekayaan Daerah, Dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Sukarela (Studi Empiris: Pemerintah Daerah Di Pulau Sumatera Tahun 2018*. 9(021), 14–27.
- Rini, T. H. C., Khaerani, A., & Munzir, M. (2022). Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial BUMN di Kota Sorong. *FAIR UNIMUDA*, 2(1), 57–69.
- Todara, P. M. (2003). *Ekonomi Pembangunan Dunia Ketiga*. Erlangga.
- Wau, I. (2015). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Dan Keteraksesan Internet Financial Reporting Oleh Pemerintah Daerah*.
- Widarwanto, A., Erlina, & Yahya, I. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum ( DAU), Dana Alokasi Khusus ( DAK ), Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), Dana Bagi Hasil ( DBH ), Bantuan Keuangan Provinsi ( BKP ) Terhadap Ipm Dengan Belanja Pelayanan Dasar ( BPD ) Sebagai Moderating. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 7(2).
- Wulandary, A., & Dfinubun, Y. (2021). Pengaruh Reputasi Kap, Dan Audit Complexity Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Fair Unimuda*, 28-42.
- Zaman, R. K. (2016). *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*. PT. Mizan Publika.
- Zimmerman, D. H., & Wieder, D. L. (1977). *The Diary: Diary-Interview Method*.